

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transportasi laut merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam dunia perdagangan, sehingga kebutuhan akan transportasi khususnya dibidang kelautan sangat besar, karena pada saat ini transportasi laut merupakan suatu alat yang paling efisien yang dapat mengangkut barang atau penumpang dari tempat satu ke tempat yang lain dengan menempuh jarak yang jauh dengan biaya yang relatif murah.

Bagi dunia perdagangan pada umumnya, baik perdagangan nasional maupun internasional pelayaran niaga sangat berperan penting. Hampir semua barang ekspor dan impor menggunakan sarana angkutan kapal laut, walaupun diantara tempat dimana pengangkutan dilakukan terdapat fasilitas-fasilitas angkutan lainnya yang berupa angkutan darat seperti truk dan kereta api. Pengangkutan barang dengan kapal laut dipilih karena dengan berbagai pertimbangan, diantaranya adalah : Jumlah barang yang diangkut akan lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan mobil truk/tangki, kereta api, atau pesawat terbang dan biaya angkut juga lebih kecil jika di bandingkan dengannya. Salah satu tujuan pengangkutan melalui kapal laut adalah mengangkut muatan melalui laut dengan cepat dan selamat sampai ke tempat tujuan agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar sebagai mana telah di tetapkan oleh perusahaan tersebut.

Maka dari itu, pelabuhan memegang peranan yang cukup penting di Indonesia. Dengan salah satu fungsi pelabuhan yaitu sebagai pintu masuk atau keluarnya barang dari suatu negara atau daerah dimana mayoritas dari barang tersebut diangkut melalui transportasi laut. Orientasi kegiatan

pelabuhan yang tidak kalah penting adalah pelayanan Annual Survey sebelum dan sesudah Docking, dimana untuk pelayanan kapal itu terdiri dari pelayanan jasa pemanduan, jasa penundaan, jasa labuh dan jasa tambat.

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi, yang bertitik tolak dari kenyataan buruk kondisi faktual kualitas pelayanan publik yang sebagian besar ditentukan oleh kualitas sikap dan karakter aparatur pemerintah.

Adapun strategi peningkatan kualitas pelayanan publik adalah pembaharuan sikap dan karakter aparatur birokrasi pemerintah, yaitu melaksanakan pelayanan umum yang memuaskan pelanggan tanpa ada pembedaan (*equality*). Perlakuan yang tidak membedakan pelanggan tidak cukup, diperlukan adanya keadilan (*equity*) serta kejujuran atau keterbukaan (*fairness*) dalam pelayanan. Pelayanan yang memuaskan dipengaruhi oleh kompetensi aparatur birokrasi pemerintah. (Surjadi:2009)

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melakukan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanandan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan kelas II Pekalongan sebagai unit pelaksana teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut. Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan kelas II pekalongan dipimpin oleh seorang kepala. Unit penyelenggaraan Pelabuhan kelas II Pekalongan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan lalu lintas dan angkutan laut, keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan pelabuhan untuk memperlancar angkutan laut. Kantor Unit penyelenggaraan Pelabuhan kelas II pekalongan sebagai penyelenggaraan pelayanan masih dihadapkan pada

sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Salah seorang agen pelayaran swasta membenarkan masih ada banyaknya keluhan dari penerima pelayanan, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap citra organisasi pemerintah Kantor Unit penyelenggaraan Pelabuhan kelas II Pekalongan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas pelayanan secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan yang prima.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengangkat suatu masalah khususnya tanggung jawab kantor Unit penyelenggaraan Pelabuhan kelas II Pekalongan terhadap prosedur Annual Survey kapal sebelum dan sesudah Docking (ON/OFF HIRE) kapal sehingga dapat menciptakan kenyamanan, efektif, dan efisien. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas dan mengambil judul “TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN KANTOR UNIT PENYELENGGARA KELAS II PEKALONGAN TERHADAP PROSEDUR ANNUAL SURVEY KAPAL SEBELUM DAN SESUDAH DOCKING (ON/OFF HIRE) KAPAL”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat waktu praktek darat (PRADA) dan luasnya ruang lingkup tentang pelabuhan, maka penulis membuat batasan-batasan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Kegiatan Pelayanan Kapal Sebelum dan Sesudah Docking (ON/OFF HIRE) pada Kantor Unit penyelenggaraan Pelabuhan kelas II pekalongan?
2. Dokumen - dokumen yang diperlukan untuk kegiatan Annual Survey kapal sebelum dan sesudah Docking?
3. Pihak - pihak mana saja yang terkait dalam proses pelayanan Docking di pelabuhan pada Kantor Unit penyelenggaraan Pelabuhan kelas II Pekalongan?

4. Hambatan - hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan kelas II Pekalongan?
5. Tanggung jawab yang di miliki oleh Kantor Unit Penyelenggra Pelabuhan Kelas II Pekalongan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Dalam penyusunan karya tulis ini, secara garis besar penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui prosedur kegiatan pelayanan kapal sebelum dan sesudah Docking (ON/OFF HIRE) pada Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan kelas II Pekalongan.
- b. Untuk mengetahui dokumen – dokumen yang diperlukan untuk kegiatan Annual Survey kapal sebelum Docking dan sesudah Docking.
- c. Untuk mengetahui pihak - pihak mana saja yang terkait dalam proses pelayanan Docking di pelabuhan pada Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan kelas II Pekalongan.
- d. Hambatan - hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan kelas II Pekalongan.
- e. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab dari Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan kelas II Pekalongan.

2. Kegunaan Penulisan

Dalam penelitian ini seluruh kegiatan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai berikut :

a. Bagi Kantor UPP Pekalongan

Sangat diharapkan menjadi bahan masukan untuk meningkatkan mutu dan pelayanan, penanganan dokumen kapal serta pelayanan terhadap pengguna jasa angkutan laut dan meningkatkan tanggung

jawab terhadap prosedur Annual Survey kapal sebelum dan sesudah Docking (ON/OFF HIRE) kapal.

b. Bagi Akademi

Memberikan ilmu pengetahuan dan informasi – informasi yang bermanfaat bagi taruna – taruni UNIVERSITAS MARITIM ’’AMNI’’ Semarang khususnya mengenai bagaimana tanggung jawab dan kewenangan Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan kelas II Pekalongan untuk prosedur Annual Survey kapal sebelum dan sesudah Docking (ON/OFF HIRE) kapal.

c. Bagi Pembaca

Untuk dijadikan pedoman dan pelajaran serta pengetahuan yang dapat meningkatkan wawasan serta sebagai gambaran untuk dapat mengerti dan memahami mengenai bagaimana prosedur yang telah di jalankan di kantor UPP Pekalongan.

1.4 **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang di tuangkan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan

Dalam bab ini penulisan mengemukakan pemulaan / awal penulisan karya tulis yang mencakup pada Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penulisa, Kegunaan Penulisan, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 Landasan Teori

Membahas tentang Tanggung Jawab dan Kewenangan Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan kelas II Pekalongan Terhadap Prosedur Annual Survey Kapal Sebelum dan Sesudah Docking (ON/OFF HIRE) kapal, Definisi-Definisi yang Berhubungan dengan pelayanan Annual Survey Kapal sebelum dan sesudah Docking (ON/OFF HIRE) kapal.

BAB 3 Tinjauan Umum

Meliputi Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab dan Kewenangan Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan kelas II Pekalongan. berisi tentang Sejarah Berdirinya, Visi, Misi dan Motto, Instansi-Instansi yang Terakit, Struktur Organisasi.

BAB 4 Pembahasan

Dalam bab ini berisi pembahasan yang meliputi beberapa hal antara lain : prosedur kegiatan pelayanan kapal sebelum dan sesudah docking (ON/OFF HIRE) pada kantor unit penyelenggaraan pelabuhan kelas II pekalongan; dokumen - dokumen yang diperlukan untuk kegiatan Annual Survey kapal sebelum docking dan sesudah docking; pihak- pihak mana saja yang terkait dalam proses pelayanan docking di pelabuhan pada Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan kelas II Pekalongan, serta hambatan - hambatan apa saja yang terjadi pada saat pelaksanaan pelayanan di Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan kelas II Pekalongan.

BAB 5 Penutup

Berisi kesimpulan serta saran-saran penulis terhadap prosedur Annual Survey kapal sebelum dan sesudah Docking (ON/OFF HIRE) kapal beserta tanggung jawab dan kewenangan Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan kelas II Pekalongan. Penulisan karya tulis ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran - lampiran yang telah diambil dalam pelaksanaan praktek darat.

Daftar Pustaka

Tulisan yang tersusun di akhir sebuah karya tulis yang berisi nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit dan tahun terbit sebagai sumber atau rujukan seorang penulis. Daftar Pustaka ada pada semua jenis karya tulis seperti buku, skripsi, makalah, artikel dan sebagainya.

Lampiran

Lampiran merupakan dokumen tambahan yang ditambahkan (dilampirkan) ke dokumen utama.